KOMPAS (Hal.9/HLD) **Selasa, 25 Februari 2025**

MAKAN BERGIZI GRATIS

Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis saat ini sudah mencakupi 2 juta penerima di 38 provinsi. Dukungan dari koperasi di desa-desa dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, dukungan anggaran yang diperlukan untuk salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu pun perlu ditambah sekitar Rp 100 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat tertutup terkait pengembangan Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025) sore. Hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Selain itu, hadir pula Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria, Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir, dan Direktur Utama Agrinas Rauf Purnama.

Seusai rapat, Dadan mengungkapkan, pihaknya akan bersinergi dengan koperasi-koperasi, terutama koperasi petani, peternak, dan penyedia bahan pangan di desa-desa. Menurut dia, Presiden Prabowo berharap koperasi di Indonesia bisa dioptimalkan untuk membangkitkan ekonomi desa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lanjut Dadan, saat ini sudah melayani lebih dari 2 juta penerima di 38 provinsi. Program yang dimulai 6 Januari ini pada tiga bulan pertama menargetkan bisa melayani 3 juta penerima. Secara bertahap, jumlah penerima ditambah. Dalam lima tahun, jumlah penerima ditargetkan bisa mencapai 82,9 juta orang.

Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun, sampai April 2025, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus naik menjadi 6 juta penerima dan Agustus sampai September menjadi 15 juta penerima. Adapun hingga Desember ditargetkan sebanyak 17,5 juta penerima program.

Karena banyak laporan anak-anak yang ingin segera mendapatkan program ini, ujar Dadan, Presiden Prabowo meminta Badan Gizi Nasional mempercepat distribusi MBG di seluruh Indonesia.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima). Jadi, kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, kita akan butuh Rp 100 triliun," tuturnya.

Apabila tahun depan percepatan dimulai, menurut Dadan, diperlukan alokasi Rp 28 triliun per bulan. Namun, kesuksesan program MBG terdiri atas tiga faktor, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketika anggaran sudah dialokasikan pemerintah, sumber daya manusia juga perlu segera disiapkan.

Saat ini, Dadan melanjutkan, baru dididik 2.000 tenaga (pendukung program MBG) dan masih akan disiapkan 30.000 orang lainnya. "Sebanyak 30.000 (tenaga) yang akan dididik ini baru akan selesai pendidikannya di akhir Juli. Jadi, baru akan siap di awal Agustus," ujarnya.

Dadan menyebutkan tidak mungkin menugaskan seorang yang baru lulus untuk langsung bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, harus ada orientasi lapangan. Selain itu, petugas SPPG harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan lainnya. Karena itu, diperkirakan SDM baru akan siap melayani pada September mendatang.

Terkait produk makanan lokal, menurut Sudaryono, produk yang akan diperkuat untuk mendukung program MBG adalah sumber protein dari daging ayam dan telur. Tak hanya itu, apabila produksi susu nasional sudah mencukupi, turut akan menjadi bagian dari program MBG. Saat ini susu produksi nasional baru mencukup 20 persen dari kebutuhan dalam negeri dan sisanya didapat dari impor.

"Oleh karena itu, pengusaha wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri. Kalau tidak dilaksanakan, izin impor dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan," ujar Sudaryono.

Ke depan, tambah Sudaryono, Presiden Prabowo meminta impor susu bisa ditekan dan sebaliknya produksi susu lokal bisa dinaikkan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah menargetkan untuk mendatangkan 2 juta sapi indukan ke Indonesia.

"Sudah ada 167 perusahaan yang komitmen untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi, negara tidak mengeluarkan (dana dari) APBN, tetapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka. Mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya," tutur Sudaryono. (INA)